RENCANA KERJA

KEMANTREN JETIS TAHUN 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari 5 ( lima ) kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Perumusan RENJA Kemantren Jetis Tahun 2021 mengakomodir program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pelimpahan kewenangan sesuai Peraturan Walikota No 71 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2021 diarahkan pada tema: : “***Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Layanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan***”.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jetis Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022.

* 1. **Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RENJA Kemantren Jetis Tahun 2021 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
13. Perwal No 58 Tahun 2018 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 59 Tahun 2018 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

* 1. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Maksud dari Rencana Kerja OPD ini untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1. Tujuan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

* 1. **Sistematika Penyusunan RENJA Kematren Jetis Tahun 2021**

BAB. I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB. II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan OPD

BAB V. Penutup.

**BAB. II.**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019**

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra OPD

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis tahun 2019**

**Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksannaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki **Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Jetis adalah**: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat**

Indikator Sasaran Kecamatan Jetis Tahun 2019 adalah **:**

**Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis dengan** Target Sasaran Kecamatan Jetis adalah **: 370**

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**KECAMATAN JETIS TAHUN 2017-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran OPD** | **Target** | **Realisasi** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2018** | **2019** |
| 1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis | 332 | 335 | 370 | 371 | 373 | 375 | 361.3 | 370.6 |

Pada Tahun 2019 Kecamatan Jetis mempunyai 4 ( empat ) program kerja yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Berikut gambaran pelaksanaan dari masing-masing program kegiatan :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.

dalam pengukuran kinerja berdasarkan pengeluaran anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan- kegiatan pelayanan administrasi perkantoran tahun 2019 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1. Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 96.26 %
2. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor target Output dan Outcomes 100 % serta realisasi 97.19 %
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

 Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan sarana san prasarana aparatur tahun 2019 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung / bangunan kantor target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 99.20 %.
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 79.20 %.
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

 Adapun kegiatan- kegiatan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan tahun 2019 dapat kami diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD target Output dan Outcomes100 % serta realisasi 99.89 %.
2. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 96.25% dengan perincian sebagai berikut :
3. Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 88.56%.
4. Peningkatan Pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat Kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99.70%.
5. Pembinaan social dan budaya masyarakat kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 99.03%.
6. Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 98.58%.
7. Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 98.36%.
8. Pembinaan ekonomi, social dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 94.84%.
9. Penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan target output dan outcome 100 % realisasi pencapaiannya 87.84%.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kecamatan didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kecamatan se Kota Yogyakarta telah seragam namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kecamatan.

Program Kegiatan Kecamatan Jetis secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dengan perincian sebagai berikut :

* + 1. Program pelayanan administrasi perkantoran dapat menyerap anggara sejumlah Rp. 916.211.601,- dari target anggaran Rp. 949.361.715,-
		2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur dapat menyerap sejumlah Rp. 133.124.000,- dari target anggaran Rp. 179.613.398,75,-
		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat menyerap sejumlah Rp. 8.472.000,- dari target anggaran Rp. 8.462.575,-
		4. Program peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan dapat menyerap sejumlah Rp. 3.181.553.419,- dari target anggaran Rp. 3.062.267.378,15,-

Jumlah pencapaian kinerja tersebut belum mencapai apa yang diharapkan karena :

* + - * 1. Dilaksanakan penghematan-penghematan biaya listrik, telepon, air, dan biaya pemeliharaan.
				2. Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan kerusakan kendaraan.
				3. Penggandaan sesuai dengan kebutuhan dokumen perencanaan dan pelaporan.
				4. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan ( dengan sistem lelang )dan fasilitas umum setelah perubahan anggaran maka pembiayaan sesuai dengan belanja pekerjaan.
1. **Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jetis yang sebagian besar anggaran digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, hal ini dimaksudkan guna mendukung kegiatan Kecamatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk anggaran pemeliharaan lingkungan dilaksanakan guna meningkatkan kelayakan lingkungan yang nyaman huni sebagai mana visi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pembangunan terhadap program dan pembangunan Kecamatan dilakukan penilaian evaluasi pembangunan dengan mengadakan penilaian evaluasi Kelurahan yang dilaksanakan tahun 2019 dengan target **370,6** dengan juri dari Tim Pemerintah Kota Yogyakarta. Ini disebabkan pemberdayaan dan pembangunan Kecamatan mempunyai program dan kegiatan yang bermanfaat sehingga permasalahan yang kaitannya dengan masyarakat menjadi teratasi.

Adapun aduan masyarakat ditargetkan pada tahun 2019 adalah 2 aduan / keluhan berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan Kecamatan namun realisasinya tidak ada aduan / keluhan. Angka ini lebih baik karena berkurang dari tahun sebelumnya (2019).

1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok maupun tugas-tugas yang lain, Kecamatan didukung anggaran dari APBD Kota Yogyakarta. Pos Anggaran untuk Kecamatan se Kota Yogyakarta telah seragam namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan masing-masing Kecamatan.

Kondisi Kecamatan yang diinginkan dan Proyeksi ke depanVisi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi suatu tujuan bersama yang semestinya dimiliki oleh masing-masing pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan itu kepemerintahan di Kota Yogyakarta sendiri berupaya untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang *Good Governance,* berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum serta berkeadilan gender.

Untuk itu, semua unsur yang berkaitan dengan Pemerintah Kota harus melakukan perombakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Diperlukan adanya perubahan prinsip berupa perubahan pola pikir dari sosok yang harus dilayani menjadi ” pelayan” yang harus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menuju ke arah itu, tentunya tidak semudah yang diucapkan. Perubahan pola pikir tentunya membutuhkan proses yang terus-menerus ditanamkan di benak sanubari para pelaksana birokrasi ( pegawai ).

SDM yang profesional, handal, sehat jasmani dan rohani, berkompetensi sesuai dengan bidangnya dan memiliki daya saing demi kemajuan yang akan dicapai merupakan cita-cita ideal dan salah satu unsur kuat yang sebaiknya dimiliki oleh suatu pemerintahan, demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan demikian telah disiapkan sosok pribadi PNS yang tangguh berjuang demi kemajuan Pemerintah Kota Yogyakarta, sosok yang mengedepankan kepentingan dan kemajuan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan unsur penting lainnya yang besar dukungannya adalah tersedianya sarana dan prasarana pemerintah yang cukup memadai. Dengan fasilitas yang mencukupi dipadukan dengan adanya SDM yang handal dan bertanggung jawab yang menjalankan proses kepemerintahan, maka cita-cita luhur Kota Yogyakarta untuk mewujudkan *Good Governance* ( Kepemerintahan yang baik ) serta *Clean Governance* ( kepemerintahan yang bersih ) akan lebih mudah tercapai.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

1. Semangat kerja yang cukup baik;
2. Memiliki Tupoksi yang cukup strategis;
3. Personil yang relatif menguasai bidang tugasnya;
4. Suasana kerja yang kondusif;
5. Adanya koordinasi yang baik dilingkungan Kecamatan dan Instansi terkait;
6. Tersedianya prasarana dan sarana yang menunjang pelaksanaan kinerja.
7. Kejelasan kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja dan rincian tugas instansi

b. Kelemahan

1. Kualitas SDM kurang memadai
2. Belum optimalnya penataan personil sesuai kemampuan yang dimiliki.
3. Data yang tersedia belum lengkap ( mis.penduduk yang belum memiliki IMB )
4. Sarana dan prasarana belum memadai

2. Eksternal

1. Peluang
	1. Kerjasama dengan instansi terkait yang baik
	2. Otonomi dan globalisasi mendorong peningkatan kualitas aparatur.
	3. Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
	4. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.
	5. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
	6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai di lingkungan Pemerintah Kota;
	7. Kelancaran akses koordinasi;
2. Ancaman
	1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima birokrasi.
	2. SDM yang berkualitas mutasi ke instansi lain
	3. Anggaran daerah yang terbatas
	4. Era reformasi dan transparansi mendorong masyarakat mudah komplain;
	5. Tuntutan akuntabilitas publik semakin tinggi

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparat dan pelayanan intern
2. Tersedianya SDM yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
3. Penyusunan SOP dan SPP
4. Peningkatan perencanaan dan pengembangan sistem pelayanan
5. Peningkatan Kinerja Pegawai
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Formulasi isu – isu strategis yangakan di tangani melalui renja OPD Kecamatan. Jetis adalah :

Penguatan tata pemerintahan di wilayah untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan berbasis kewilayahan dan pemerataan pembangunan di wilayah.

a. Isu strategis Infrastuktur dan Tata Ruang

1. Pembangunan berbasis Kampung dengan dijiwai semanagt dan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto

2. Millinium Deplomen Goals ( MDGs)

3. Standar Pelayanan Minimal

4. Reformasi Birokrasi

5. Ruang Terbuka Hijau

6. Penangulanangan dan Penanganan Bencana

7. Permukiman tidak layak huni

b. Isu strategis Pariwisata dan Budaya

1. Pariwisata berbudaya

 - Pengembangan Kampung-kampung wisata

2. Memperkuat kearifan lokal di masyarakat

3. Pengembangan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mendukung pariwisata, baik budaya, seni, kuliner

c. Isu strategis Ekonomi

1. Koperasi dan UMKM

2. Persaingan ketat pasar modern dan pasar tradisional

d. Isu strategis Kemiskinan

1. Penurunan Angka Kemiskinan.

2. Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan.

e. Isu strategis Lingkungan

1. Perlindungan ketersediaan air

- terpeliharanya imbuhan air tanah, melalui pembangunan biopori, sumur peresapan

- pengendalian pencemaran air tanah

2. Pengolahan Sampah Mandiri.

3. Kesiapsiagaan Bencana.

4. Membangun perilaku ramah lingkungan.

1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 3 Tahun 2015 tentang Keuangan Negara serta turunan peraturan dibawahnya, mekanisme perencanaan pembangunan partisipasif dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dokumen yang dihasilkan meliputi dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk melakukan perencanaan pembangunan tahunan perencanaan dilakukan mulai dari organisasi masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW, Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya usulan diteruskan ke tingkat Kota Yogyakarta. Hasil akhir dari pelaksanaan musyawarah tahunan adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Pada tahapan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan yang berbasis partisipasif mendapatkan perhatian lebih, sebab pembahasan di tingkat Kelurahan biasanya akan menentukan kualitas usulan kewilayahan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2020 disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kewilayahan OPD Kecamatan pada tahun 2019 dan dana kelurahan sebesar Rp.350.000.000,- yaitu sebagai berikut :

Kelurahan Bumijo - Rp. 350.000.000,-

Kelurahan Cokrodiningratan - Rp. 350.000.000,-

Kelurahan Gowongan - Rp. 350.000.000,-

Dari pagu masing-masing Kelurahan dibagi 2 pembangunan yaitu Fisik 40 % dan Non fisik 60 % dengan deviasi kurang dari 20 %.

 Dari musyawarah pembangunan Kecamatan diperoleh informasi pula bahwa usulan dana swadaya fisik masyarakat Kecamatan Jetis sebesar Rp. 61.738.600,-

Sedangkan untuk usulan dana stimulan RW dan LPMK se Kecamatan Jetis sebesar Rp. 901.300.000,-

Usulan pembangunan Fisik sumber dana OPD Kecamatan sebesar Rp. 804.704.000,-

Usulan Pembangunan Non Fisik SKPD Kecamatan sebesar Rp. 876.778.000,-

Usulan Pembangunan Fisik sumber dana SKPD Kota Yogyakarta / Terkait adalah sebesar :

Kelurahan Bumijo - Rp. 332.834.000,-

Kelurahan Cokrodiningratan - Rp. 222.320.000,-

Kelurahan Gowongan - Rp. 249.550.000,-

Usulan Pembangunan Non Fisik sumber dana OPD Kota Yogyakarta / Terkait adalah sebesar :

Kelurahan Bumijo - Rp. 70.200.000,-

Kelurahan Cokrodiningratan - Rp. 182.195.000,-

Kelurahan Gowongan - Rp. 138.145.000,-

 Melihat dari usulan serta ketersediaan anggaran khususnya dana yang bersumber dari OPD Kecamatan tentu ada ketimpangan antara usulan dengan dana yang tersedia berdasar pagu indikatif Kecamatan Jetis, maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan skala prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan dengan berpedoman pada kebutuhan darurat dan mendesak terutama dari sisi kemanusiaan serta menyangkut kehidupan orang lebih banyak dalam pemanfaatannya. OPD Kecamatan juga berusaha menyatukan kegiatan duplikasi terutama pembangunan kewilayahan antara PPTK Kecamatan dengan PPTK Kelurahan. Program Kegiatan yang pada akhirnya dapat dianggarkan diinformasikan kepada masyarakat melalui khususnya stake holder Kecamatan dan LPMK di masing-masing Kelurahan.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan maka diperlukan perencanaan pembangunan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara.

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
3. Melakukan revolusi karakter bangsa
4. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international hingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
5. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.
6. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
7. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
8. Memperkuat kehadiran negara dlam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

Dalam RKPD DIY tahun 2020 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pelestarian Nilai Budaya;
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan kapasitas Ekonomi;
4. Pengembangan Pariwisata;
5. Penguatan kapasitas infrastruktur;
6. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup;
7. Reformasi Birokrasi.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2020 yaitu:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut OPD Kecamatan Jetis tentu saja menyesuaikan dengan arah kebijakan tersebut dan se optimal mungkin sesuai dengan kondisi wilayah serta usulan kebutuhan dari masyarakat Jetis.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

* 1. Tujuan

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis”.

2. Sasaran

” Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat”.

* 1. Program dan Kegiatan

Program – program dan kegiatan OPD Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut

* + - 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan :

* + - * 1. Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi.
				2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
			1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan :

* + - * 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung / bangunan kantor.
				2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
	1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari kegiatan :

* + - * 1. Penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian dan laporan capaian kinerja OPD
	1. Peningkatan Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Kecamatan Berbasis Kewilayahan

Terdiri dari kegiatan :

* + - * 1. Penyelenggara pemerintahan dan ketertiban kecamatan Jetis.
				2. Penyelenggara pelayanan, informasi dan pengaduan kecamatan Jetis.
				3. Pembinan social dan budaya masyarakat Kecamatan Jetis
				4. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo
				5. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
				6. Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan
				7. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Jetis.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

RENJA Kemantren Jetis Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RENJA ini juga mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2021. Rencana program dan kegiatan tahun 2021 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RENJA ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RENJA ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2021. Prioritas Program dalam RENJA tahun 2021 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

**BAB V**

**PENUTUP**

Proses demokrasi pembangunan telah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proses pembangunan, sedang peran pemerintah lebih bersifat sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. Perubahan paradigma pembangunan tersebut mengubah peran masyarakat dalam proses pembangunan dan yang bersifat partisipasi masyarakat menjadi prakarsa masyarakat. Dengan demikian, Kecamatan Jetis sebagai ujung tombak pemerintahan di Daerah merupakan posisi yang sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dibidang pembangunan secara berkelanjutan. Rencana Program di Kemantren Jetis ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Jetis pada tahun 2021. Rencana program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat program kewilayahan, sedang pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya Kemantren Jetis. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi pertama Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan. Pembangunan kewilayahan dan Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah, untuk itu Kemantren Jetis perlu mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat, instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan masyarakat ini, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kemantren Jetis dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota serta OPD terkait dalam proses pembangunan masyarakat, serta keberanian untuk mengambil peran strategis sesuai dengan tugas Kecamatan serta Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Matri Pamong Praja agar tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2020 disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam angka.Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan misi Kemantren Jetis.